

Jakarta, 16 April 2024.

**Kepada yang Saya Hormati,
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Pemeriksa Perkara Nomor : 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat
10110**

Perihal: Amicus Brief

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, REZA INDRAGIRI AMRIEL, dengan mohon berkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Amicus Brief yang saya ajukan ini, serta mempertimbangkannya dalam memeriksa serta memutus perkara 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan judul Perselisihan Hasil Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Amicus Brief ini saya ajukan selaku Amicus Curiae (Sahabat Peradilan).

Amicus Brief ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim sebagai bentuk kontribusi keilmuan psikologi atas persoalan terkait pemberian bantuan sosial (bansos) menjelang penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2024. Secara spesifik, ide untuk menulis Amicus Brief ini dipantik oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ketika menyampaikan kesaksiannya pada sidang sengketa Pilpres 2024 di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 April 2024.

Pada saat itu Menko PMK menyatakan, "Terlalu mustahil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional. Itu saya kira doesn't make sense."

Melalui Amicus Brief ini, saya menyampaikan pandangan tentang dua hal. Pertama, mekanisme psikologi di balik pengaruh pemberian bansos terhadap sikap politik masyarakat. Kedua, dampak destruktif bansos terhadap relasi antara masyarakat dan pemerintah (pemberi bansos).

***Pertama*, mekanisme psikologi di balik pengaruh pemberian bansos terhadap sikap politik (keputusan elektoral) masyarakat.**

Rekayasa sosial (*social engineering*) pada banyak hal dilangsungkan dengan memanfaatkan mekanisme *vicarious learning*. Istilah *vicarious learning* menunjuk pada kemampuan manusia untuk belajar melalui pengamatan (observasi), bukan berdasarkan pengalaman langsung.

Contoh, warga negara yang menentang penguasa dihukum berat di hadapan publik. Eksekusi sedemikian rupa dilakukan agar orang-orang yang menyaksikan prosesi tersebut merasa kengerian dan kesakitan yang sama sehingga tidak meniru perbuatan serupa.

Contoh lain *vicarious learning* adalah penganugerahan Hoegeng Award bagi personel polisi yang berprestasi. Penghargaan dimaksud diselenggarakan agar para anggota kepolisian lainnya terinspirasi untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan kinerja mereka serta agar masyarakat mengetahui adanya kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh sekian banyak polisi teladan. Pengetahuan itu pada gilirannya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Indikator kepercayaan itu, misalnya, kesediaan masyarakat untuk melaporkan peristiwa pidana serta dukungan dan antusiasme warga untuk ambil bagian dalam kegiatan kepolisian.

Mengacu uraian tentang mekanisme *vicarious learning* di atas dapat dipahami bahwa bansos juga potensial bekerja dengan memengaruhi mental masyarakat. Sehingga, walaupun bansos Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri diberikan "hanya" kepada ribuan orang, namun lewat kabar dari mulut ke mulut serta ditopang ekspos media konvensional dan media sosial secara masif, berjuta-juta orang Indonesia akan dapat terpengaruh pilihan politiknya. Demikian pula, ketika Presiden dan sejumlah pembantunya dianggap mendatangkan kesenangan lewat banjir bansos, masyarakat pun akan dapat mengasosiasikan kebaikan itu ke figur-figur yang memiliki hubungan atau satu kubu dengan Presiden.

Teori tentang *vicarious learning* bersumber utamanya dari hasil penelitian Albert Bandura, salah satu ilmuwan ternama di bidang psikologi dari Mazhab Perilaku Kognitif.

Kedua, dampak destruktif bansos terhadap relasi antara masyarakat dan pemerintah.

Praktik bagi-bagi bansos pada masa kampanye politik merupakan penerapan Pork Barrel Theory. Bagaimana efek *pork barrel* terhadap keputusan politik masyarakat, ditentukan antara lain oleh waktu penyerahan bansos. *Pork barrel* terbukti berpengaruh positif ketika digelontorkan menjelang hari pencoblosan.

Pembagian *pork barrel* tidak sebatas memengaruhi pilihan politik sebagaimana dijelaskan pada poin pertama Amicus Brief ini. Lebih lanjut, *pork barrel* menentukan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Demikian simpulan studi di negara-negara semisal Slovakia dan Czech. Kedua negara Eropa Timur itu memiliki kesamaan dengan Indonesia, yakni negara yang marak akan korupsi.

Di negara-negara korup tersebut, terbukti tiga hipotesis, yaitu

Hipotesis kesediaan untuk memilih: ketika masyarakat diuntungkan oleh "hujan uang", mereka akan memilih atau mencoblos si pengucur uang kendati uang itu dibagi-bagikan secara tidak patut.

Hipotesis kepercayaan: ketika masyarakat memperoleh keuntungan dari *pork barrel*, mereka akan percaya pada pembuat kebijakan (pemberi *pork barrel*) betapapun sumber daya *pork barrel* itu dibagikan secara tidak wajar.

Hipotesis dukungan kebijakan: masyarakat akan tetap mendukung kebijakan yang dibuat secara tidak *fair* karena mereka merasa telah diuntungkan oleh kebijakan yang sesungguhnya tidak bijak itu.

Jadi, sungguh tepat ketika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bertanya ke empat menteri Presiden Jokowi yang hadir sebagai di sidang Mahkamah Konstitusi. Para menteri itu ditanya, apakah Presiden Jokowi memberikan peringatan terkait dengan pembagian bansos di tengah masa kampanye. Hasil penelitian tentang efek *pork barrel* terhadap konstituen di negara-negara korup nyata-nyata menunjukkan bahwa pemberian bansos pada masa kampanye memang memiliki ramifikasi masalah yang sangat serius. Pada titik itu, menjadi relevan bagi pemerintah untuk tidak melakukan Langkah—dalam hal ini pembagian bansos—yang berisiko negatif baik untuk jangka pendek (pembiasan keputusan elektoral) maupun jangka panjang (sikap terhadap kebijakan yang tidak konstruktif).

Uraian utuh tentang dampak *pork barrel* terhadap relasi antara masyarakat dan pemerintah dimuat, antara lain, pada Tóth, M., Nemčok, M., & Spáč, P. (2022). I Don't Like It Unless It's for Me: Voters' Perceptions of Pork-Barrel Politics in Central and Eastern Europe. *Problems of Post-Communism*, 69(6), 473–485.

Demikian Amicus Brief ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya berharap, insya Allah, Amicus Brief ini dapat menjadi sumbangan substantif bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan serta memutus perkara dimaksud.

Hormat kami,



REZA INDRAGIRI AMRIEL